
ANALISIS INDEKS Maturity SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Sarnita Wolio¹, Jusuf Madubun², Stanislaus Kostka Ohoiwutun³

Wolio Sarnita, wolio_sarmita@gmail.com, Universitas Pattimura¹

Jusuf Madubun, j.madubun8@gmail.com, Universitas Pattimura²

Stanislaus Kostka Ohoiwutun, ohoiwutun.stanislaus@gmail.com, Universitas Pattimura³

Abstract

This study aims to determine and analyze the level of maturity of SPBE and recommendations for improving aspects for SPBE implementation based on the evaluation results in the West Seram Regency Government. This study focuses on the SPBE of the SBB Regency Government, where the focus of this research is carried out at the SBB Regency Communication and Information Service. Data observation is carried out on the achievement of SPBE implementation in the SBB Regency Government. The data analysis technique used is the calculation to determine the assessment of the level of maturity and weight and determine the aggregate index value of the maturity level value for each SPBE implementation indicator. Measurement of each level of maturity is given a value of level 1 to 5. Weights are given to domains and aspects according to different levels of importance. The weight of each domain and aspect can be seen in the SPBE maturity level criteria, namely; Process Capability Maturity Level and Service Capability Maturity Level. The results of the study concluded that the results of the SPBE maturity level evaluation through the monitoring and evaluation guidelines of PermenPANRB Number 59 in 2020, the West Seram Regency Government obtained an index value of 1.86 with the predicate "Sufficient". The West Seram Regency Government has weaknesses in all aspects of SPBE implementation, both in terms of internal policies, governance, Management and SPBE services. It has used several applications developed by the central government or developed within its own scope, but the service features of the applications built need to be developed in optimizing public services in West Seram Regency.

Keywords: Maturity Index; SPBE; Government System.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kematangan SPBE dan rekomendasi perbaikan aspek untuk implementasi SPBE berdasarkan hasil evaluasi di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat . Penelitian ini difokuskan pada SPBE Pemerintah Kabupaten SBB, dimana fokus penelitian ini dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SBB. Pengamatan data dilakukan terhadap capaian implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten SBB. Teknik analisis data yang digunakan yaitu perhitungan untuk menentukan penilaian tingkat kematangan dan bobot serta menentukan nilai indeks secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada setiap indikator pelaksanaan SPBE. Pengukuran dari setiap tingkat kematangan diberi nilai level 1 sampai dengan 5. Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat kepentingan yang berbeda. Bobot setiap domain dan aspek dapat dilihat pada kriteria tingkat kematangan SPBE yakni ;Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hasil evaluasi tingkat kematangan SPBE melalui pedoman pemantauan dan evaluasi PermenPANRB Nomor 59 pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Seram

bagian Barat memperoleh nilai indeks sebesar 1.86 dengan predikat “Cukup”. Pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat memiliki kelemahan pada seluruh aspek penerapan SPBE baik itu pada aspek kebijakan internal, tata kelola, Manajemen dan layanan SPBE. Telah menggunakan beberapa aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah pusat maupun dikembangkan dalam lingkup sendiri, namun fitur layanan aplikasi yang dibangun perlu dikembangkan dalam mengoptimalkan layanan publik di Kabupaten Seram bagian Barat.

Kata kunci: Indeks Maturt, SPBE, Sistem Pemerintahan.

Received : 22 September 2025

Accepted : 21 October 2025

Published : 30 November 2025

Copyright Notice : Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. LATAR BELAKANG

Indonesia yang tergolong sebagai Negara berkembang satu dasawarsa ini menunjukkan peningkatan pesat dalam penggunaan internet. Walaupun belum menyamai negara-negara maju lainnya, tetapi hal ini sudah dapat menggambarkan bahwa Indonesia sudah siap untuk beralih menuju pada penerapan e-government. Implementasi e-government merupakan suatu bentuk perubahan baru yang diharapkan dari sebuah negara yang berkembang. Karena semakin berkembangnya informasi dan semakin pesatnya kemajuan TIK, perubahan untuk menjadi good government sangat diharapkan masyarakat. Masyarakat sangat optimis dengan adanya e-government yang nantinya diharapkan menimbulkan dampak perubahan ke arah yang lebih baik bagi pelayanan dalam pemerintahan.

Saat ini, menurut (Wijatmoko, 2020), penggunaan TIK di lingkungan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik terus mengalami pertumbuhan, sejalan dengan kebutuhan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal dan aman. Penggunaan TIK yang makin kompleks dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman Keamanan Informasi, yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan layanan, sehingga dapat mengganggu kinerja penyelenggara pelayanan publik. Peran sumber daya informasi dan TIK semakin penting bagi upaya peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu realisasi tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance).

Namun demikian, perkembangan kondisi SPBE Indonesia sangatlah rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Dengan adanya fakta tersebut, pemerintah indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang membahas tentang pelaksanaan SPBE yang merupakan bentuk dari sistem E-Government yang selama ini diterapkan langkah tersebut diyakini menjadikan Indonesia mengalami Kenaikan Peringkat menjadi lebih baik (Hadi et al., 2021).

Di Indonesia, salah satu langkah untuk melakukan transformasi digital adalah dengan menerapkan kebijakan e- government melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Kebijakan tersebut mengimbau agar pemerintah pusat dan daerah dapat mengembangkan e-government dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sejak saat itu layanan digital berkembang pesat, namun mengakibatkan pemborosan anggaran karena layanan tersebut tidak terintegrasi antar pemerintah pusat dan daerah. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan kebijakan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) untuk mengatur transformasi layanan digital yang terintegrasi. Kebijakan tersebut direspon langsung oleh pemerintah pusat dan daerah dengan melakukan berbagai inovasi layanan digital. Kebijakan

ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi dengan melakukan transformasi layanan digital dalam memberikan pelayanan sesuai dengan visi yang ingin dicapai, yaitu “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”. Secara nasional, capaian indeks SPBE pemerintah daerah masih rendah, terutama di kawasan Indonesia Bagian Timur.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2018, SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau dalam istilah internasional disebut E-Government (E-Gov). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya (Saharah et al., 2020); (Febriani et al., 2023).

SPBE merupakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada instansi pemerintahan. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih berkualitas (Panjaitan et al., 2021), (Wahyuni, 2023); (Silitonga et al., 2023). Sistem pemerintahan berbasis elektronik diselenggarakan dengan prinsip efektifitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Dimana prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggarannya (Syafnel et al., 2019), (Hadi et al., 2021), (Nadhifah et al., 2023), (Muka et al., 2020)

Ahad & Barsei (2023) melaporkan bahwa capaian indeks SPBE Tahun 2022 untuk Indonesia Bagian Barat (indeks SPBE rata-rata: 2,45) memiliki capaian lebih baik dibandingkan Indonesia Bagian Timur (indeks SPBE rata-rata: 1,96). Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian indeks SPBE masih mengalami ketimpangan antara Indonesia Bagian Timur dan Barat, terutama disebabkan oleh kesenjangan digital (digital divide). Rendahnya indeks SPBE dapat berdampak pada data dan informasi yang kurang akurat, pemborosan anggaran, dan rendahnya kualitas pelayanan publik. SPBE bukan hanya pemanfaatan layanan digital, tapi juga memiliki interoperabilitas, keterpaduan, dan kesinambungan antar

layanan baik pemerintah pusat dan daerah. Dapat dikatakan bahwa SPBE merupakan pengembangan dari e-government itu sendiri (Wamafma, 2022).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Agar berjalan dengan lancar maka perlu dilakukannya evaluasi secara berkala untuk menghasilkan suatu nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level). Kegiatan Evaluasi SPBE dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Akan Dievaluasi Sedikitnya Mencakup Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, Dan Kebijakan SPBE .

Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan bagian dari Provinsi dengan luas wilayah 84.181 kilometer persegi atau sekitar 11,82 persen dari total luas wilayah Provinsi Maluku. Secara geografis Kabupaten terletak di 2,550 Lintang Selatan sampai 03,30 0 Lintang Selatan dan 127 0 Bujur Timur sampai 55 0 Bujur Timur. Secara administratif di sebelah Utara berbatasan dengan Seram, di sebelah Selatan berdampingan dengan Kabupaten Maluku Barat Daya, di sebelah Timur bersebelahan dengan Kabupaten Maluku Tengah, dan di sebelah Barat bertetangga dengan Kabupaten Buru Pemekaran kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 s/d 10 tahun 2010 tentang Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Seram Bagian Barat pada kenyataannya telah diwujudkan dalam berbagai aspek, seperti penerapan aplikasi perencanaan, aplikasi keuangan atau SIMDA, aplikasi kepegawaian atau SIMPEG dan sebagainya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kematangan dengan melakukan evaluasi SPBE dengan harapan hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur progres implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Penelitian ini menggunakan Pedoman Evaluasi SPBE agar penilaian dilaksanakan dengan efektif dan obyektif . Pedoman Evaluasi SPBE disusun untuk memberikan petunjuk dalam melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di Pemerintah Seram Bagian Barat. Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk mengetahui komponen apa saja yang kurang di Pemerintah Seram Bagian Barat agar dapat diperbaiki secepatnya. Selain itu untuk menguji proses kesiapan di Pemerintah Seram Bagian Barat untuk menghadapi evaluasi SPBE yang

dalam waktu dekat akan dilakukan oleh Kementerian PANRB. Evaluasi ini dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Seram Bagian Barat menggunakan SPBE.

Melalui pedoman evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, dapat dilakukan analisa terhadap tingkat kematangan penerapan SPBE dalam suatu daerah, penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan struktur domain arsitektur SPBE, aspek penilaian spesifik dari domain kebijakan internal SPBE, domain tata kelola SPBE, serta domain layanan SPBE (Khaidarmansyah & Ridwan Saifuddin, 2022), (H. D. Pratiwi et al., 2020) ; (Pratama et al., 2021), (Supriyanto et al., 2021), Astuti et al. (2021).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data berupa angka untuk mengkaji fenomena yang diteliti secara objektif. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan, yaitu pada Agustus hingga September 2024, di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai leading sector dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Fokus penelitian diarahkan pada tingkat implementasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan tujuan menilai sejauh mana sistem ini telah diterapkan secara efektif sesuai pedoman yang berlaku.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap informan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan SPBE, baik secara langsung maupun tidak langsung. Data ini berupa pendapat, persepsi, dan penilaian responden terhadap efektivitas kebijakan SPBE. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, dan catatan resmi yang tersedia di instansi terkait. Data utama dicatat melalui catatan tertulis, rekaman, dan dokumentasi seperti foto kegiatan lapangan untuk memperkuat hasil penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara serta asesmen lapangan menggunakan kuesioner berdasarkan pedoman evaluasi SPBE Kementerian PANRB Nomor 59 Tahun 2020. Kuesioner ini digunakan untuk mengukur tingkat kematangan SPBE pada setiap indikator pelaksanaan. Analisis data dilakukan dengan menghitung tingkat kematangan dan bobot dari setiap domain dan aspek, kemudian menentukan nilai indeks agregat SPBE. Tingkat kematangan diberi skor antara 1 hingga 5, di mana nilai tertinggi menunjukkan tingkat kematangan terbaik. Evaluasi ini mencakup dua dimensi utama, yaitu tingkat kematangan kapabilitas proses dan tingkat kematangan kapabilitas layanan, yang masing-

masing menilai tata kelola SPBE serta kualitas layanan pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Seram Bagian Barat.

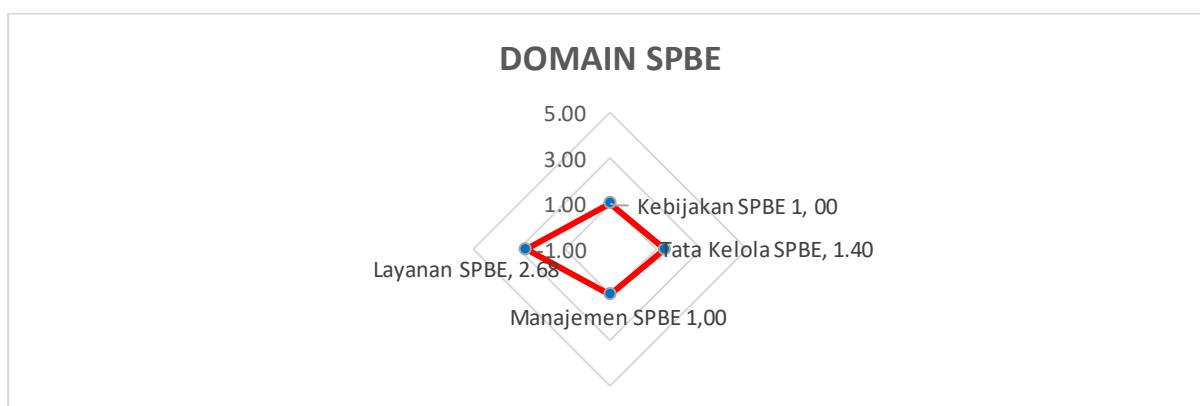
3. HASIL

Hasil dari penelitian mengenai analisis SPBE yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menjabarkan identifikasi domain, aspek dan indikator SPBE untuk meningkatkan proses kerja penerapan SPBE Perangkat Daerah. Evaluasi SPBE dilakukan dengan metode penilaian tingkat kematangan SPBE untuk mengukur level kematangan melalui evaluasi secara mandiri yang dibuktikan menggunakan data pendukung. Hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan oleh evaluator internal dan evaluator eksternal (Kementerian PAN & RB) tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pengukuran terhadap tingkat kematangan setiap indikator yang telah dilakukan, selanjutnya menghitung Nilai Indeks Tingkat Kematangan untuk menghasilkan angka Nilai Indeks SPBE. Pengukuran tingkat kematangan dilakukan secara sistematis dengan diawali menilai level tiap indikator. Selanjutnya menghitung Nilai Indeks tingkat kematangan yang terdiri dari:

1. Nilai Indeks Aspek
2. Nilai Indeks Domain
3. Nilai Indeks SPBE

Dari nilai-nilai tersebut, kemudian dihitung secara gabungan dari level tingkat kematangan Indikator. Tahapan pengukuran tersebut dilakukan sesuai dengan pedoman evaluasi tingkat kematangan pada PerMenPANRB 59 TAHUN 2020. Akumulasi penghitungan data yang telah dilakukan menghasilkan Nilai Indeks dan predikat penilaian SPBE yang menentukan kondisi dari penerapan SPBE pada suatu Pemerintah Daerah/Instansi Pusat, adapun hasil Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023 pada gambar di bawah ini.



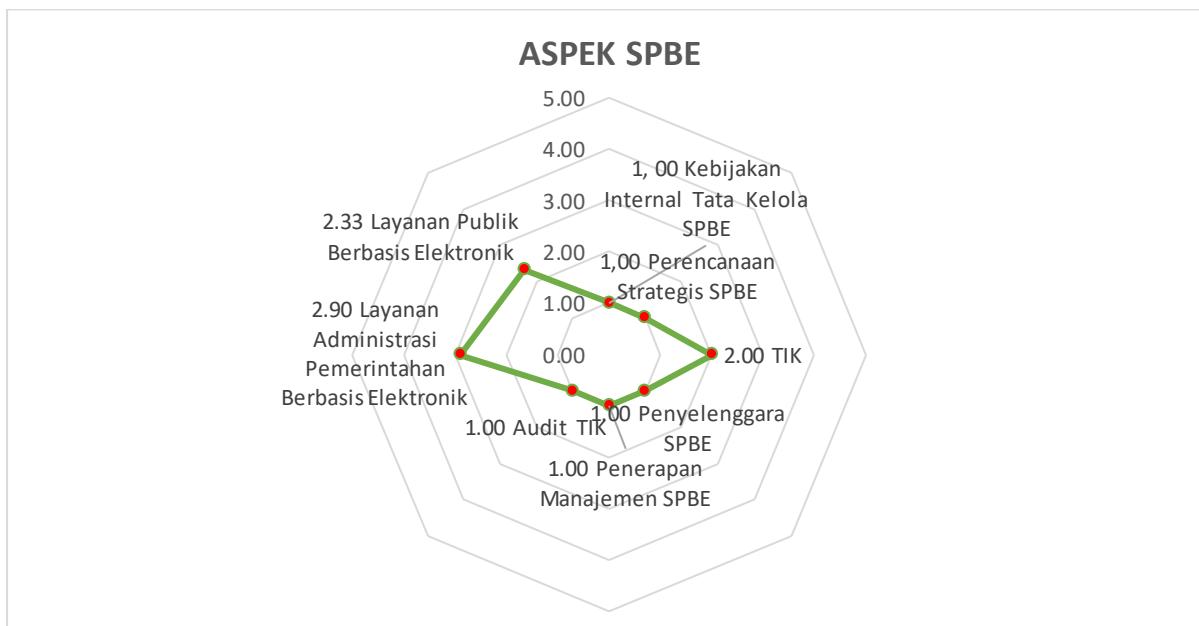
Gambar 1. Grafik Radar Indeks Tingkat Kematangan Domain SPBE Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa nilai indeks SPBE yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat 2023 dari domain kebijakan SPBE sebesar 1,00, domain tata kelola SPBE sebesar 1,40, domain manajemen SPBE sebesar 1,00 dan domain layanan SPBE sebesar 2,68, hal ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan penerapan SPBE pada beberapa domain SPBE yang berhasil dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat rata-rata sebesar 1,52 masih kategori kurang. Hasil ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang menjadi penyebab kurangnya nilai indeks SPBE yang dihasilkan. Beberapa aspek yang menyumbang nilai paling rendah berada pada domain kebijakan SPBE, domain tata kelola SPBE, domain dan sisanya hanya 1 domain yang memberikan kontribusi dengan nilai 2,68 yaitu domain layanan SPBE.

Pembentukan kebijakan terkait implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Kabupaten Seram Bagian Barat yang diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2023 belum juga terealisasikan. Hal ini dapat diketahui dari domain kebijakan SPBE yang berada pada nilai 1,00 tentunya regulasi atau kebijakan terkait SPBE tidak mengalami perbaikan secara signifikan. Belum adanya regulasi yang mengatur secara keseluruhan perangkat daerah yang ada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang implementasi SPBE rata-rata masih bersifat pemberian informasi kepada pengguna apalagi yang berkaitan dengan layanan publik berbasis elektronik.

Disisi lain pada domain layanan SPBE dengan nilai domain sebesar 2,68 menunjukkan bahwa penerapan layanan aplikasi yang dimiliki oleh Kabupaten Seram Bagian Barat aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah berjalan dengan baik. Implementasi layanan ini terlihat pada Layanan yang terkait dengan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Barang Milik Negara, Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Kinerja Pegawai yang sudah cukup matang sehingga fungsi kolaborasi antar layanan sudah berjalan dengan baik. Sebagian layanan administrasi pemerintahan sudah saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal kpemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal.

Selanjutnya untuk melihat perkembangan gambaran penerapan SPBE di Kabupaten Seram Bagian Barat dari aspek SPBE dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Grafik Radar Indeks Tingkat Kematangan Aspek SPBE Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

Sumber: Dikelola Peneliti, (2025).

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan bahwa nilai indeks SPBE yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat 2023 dari aspek kebijakan internal tata kelola SPBE sebesar 1,00, aspek perencanaan strategis SPBE sebesar 1,00, aspek teknologi dan Informasi (TIK) sebesar 1,00, dan aspek penyelenggara SPBE sebesar 1,00 hal ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan penerapan SPBE pada beberapa aspek SPBE yang berhasil dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat rata-rata sebesar 1,52 masih kategori kurang. Hasil ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang menjadi penyebab kurangnya nilai indeks SPBE yang dihasilkan. Beberapa aspek yang menyumbang nilai paling rendah yaitu sebesar 1,00 yaitu:

1. Aspek kebijakan tata kelola SPBE
2. Perencanaan strategis SPBE
3. Teknologi dan Informasi (TIK)
4. Aspek penyelenggara SPBE
5. Aspek penerapan manajemen SPBE
6. Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE di Kabupaten Seram Bagian Barat belum terpenuhi. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE masih dalam proses penyusunan dan sudah sampai pada tahap harmonisasi di Kemenkumham. Belum terdapat kekuatan pada setiap indikator dalam aspek Kebijakan

Internal Tata Kelola SPBE Semua indikator yg terdapat dalam aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE masih lemah. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat masih sementara melakukan penyusunan dokumen kebijakan internal terkait SPBE.

Penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE belum terpenuhi. Pada aspek ini belum ada penyusunan dokumen perencanaan SPBE baik itu dokumen arsitektur SPBE, peta rencana, penganggara sampai dengan Inovasi probis SPBE. Dokumen perencanaan yang ada saat ini hanya dokumen blueprint IT yang dapat mendukung penyelenggaraan SPBE. Penerapan pada Aspek Teknologi Informasi belum terpenuhi. Pada aspek ini, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat belum memiliki sebahagian dokumen yang menunjukkan operasional TIK yaitu pemetaan tipologi jaringan. Penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE di Kabupaten Seram Bagian Barat belum terpenuhi. Belum ada dokumen yang menunjukkan kegiatan SPBE yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE. Penerapan Manajemen SPBE di Kabupaten Seram Bagian Barat belum terpenuhi. Belum ada dokumen yang menunjukkan pelaksanaan program SPBE serta belum adanya peta rencana SPBE membuat pelaksanaan program sifatnya hanya insidentil. Penerapan pada Aspek Audit TIK di Kabupaten Seram Bagian Barat belum terpenuhi. Belum ada dokumen yang menunjukkan pelaksanaan Audit TIK dan dokumen pendukung pelaksanaan Audit TIK.

4. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa Berdasarkan hasil evaluasi tingkat kematangan SPBE melalui pedoman pemantauan dan evaluasi PermenPANRB Nomor 59 pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh nilai indeks sebesar 1.86 dengan predikat “Cukup”. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki kelemahan pada seluruh aspek penerapan SPBE baik itu pada aspek kebijakan internal, tata kelola, Manajemen dan layanan SPBE. Telah menggunakan beberapa aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah pusat maupun dikembangkan dalam lingkup sendiri, namun fitur layanan aplikasi yang dibangun perlu dikembangkan dalam mengoptimalkan layanan publik di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Taqiya et al., 2020) bahwa dalam melakukan analisis tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang diawali dengan studi literatur dan observasi, penentuan business goal (BG), pengumpulan data dan bukti, penentuan tingkat kematangan, serta penentuan hasil temuan dan rekomendasi.

SPBE bertujuan untuk menyelaraskan semua infrastruktur yang ada di kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah agar saling terintegrasi. Selain itu, SPBE juga memberikan perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE dan menjaga kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Putri et al.,

2021). Dengan dilaksanakannya Evaluasi SPBE diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas proses yang ada serta kapabilitas fungsi penggunaan (TIK) dalam birokrasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat daerah (Hidayah & Almadani, 2022). Agar pelaksanaan SPBE di setiap daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan, maka diperlukan penilaian atau evaluasi secara teratur untuk mengetahui dan memastikan kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan juga di setiap Pemerintah Daerah (Kencono et al., 2024).

Model tingkat kematangan merupakan model pengukuran terhadap perkembangan kapabilitas/kemampuan organisasi pada suatu bidang yang ditunjukkan dengan tingkat kematangan. Setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria. Kriteria dimaksud akan digunakan sebagai alat ukur untuk menilai perkembangan kapabilitas organisasi pada suatu bidang. Semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh organisasi menunjukkan semakin tinggi kapabilitas organisasi tersebut (Anugrah et al., 2022).

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh nilai indeks sebesar 1,86 dengan predikat “Cukup”, sesuai dengan pedoman evaluasi PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SPBE masih berada pada tahap pengembangan dan memerlukan peningkatan di seluruh aspek, baik kebijakan internal, tata kelola, manajemen, maupun layanan SPBE. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah memanfaatkan beberapa aplikasi, baik yang dikembangkan oleh pemerintah pusat maupun internal daerah, namun masih diperlukan pengembangan fitur dan integrasi layanan agar dapat memberikan pelayanan publik yang lebih optimal dan efisien.

Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat segera mengesahkan rancangan peraturan bupati (Ranperbup) tentang penyelenggaraan SPBE sebagai dasar hukum pelaksanaan di daerah. Selain itu, pemanfaatan aplikasi berbagi pakai yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, seperti SRIKANDI, perlu ditingkatkan untuk memperkuat layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik. Dalam proses evaluasi, bukti dukung seperti tangkapan layar atau video sebaiknya menampilkan seluruh fitur aplikasi yang digunakan. Pemerintah daerah juga perlu segera membentuk Tim Koordinasi SPBE guna mengawal implementasi kebijakan dan memastikan manajemen SPBE berjalan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga pada evaluasi berikutnya nilai indeks dapat meningkat dan mencapai kategori yang lebih baik.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ahad, M. P. Y., & Barsei, A. N. (2023). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Best Practice Dari Pemerintah Daerah Di Indonesia Timur. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(1), 52–74.
- Anugrah, Z. E., Zakaria, S., & Darmawan, I. (2022). Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Kota Bekasi Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 2(1), 13–24. <https://doi.org/10.24198/janitra.v2i1.41097>
- Astuti, N. P. J., Sukarsa, I. M., & Raharja, I. M. S. (2021). Analisis Aspek Penerapan SPBE pada Salah Satu Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Komputer*, 2(3), 571–577. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jitter/article/view/79788>
- Dwitawati, I. (2022). Implementasi Gap Analisis Dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Kabupaten Bener Meriah. *JINTECH: Journal Of Information Technology*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.22373/jintech.v3i1.1552>
- Febriani, A. I., Hasanuddin, & Saeri, M. (2023). Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Siak Tahun 2022. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 580–588.
- Hadi, I., Gumlang, S. F. S., & Nugraha, R. A. (2021). Arsitektur Enterprise Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Domain Data di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan. *E-Proceeding of Engineering*, 8(5), 9098–9106.
- Handika, D. Y., Mulyana, R., & Ambarsari, N. (2019). Analisis Arsitektur Enterprise Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan Kerangka Kerja TOGAF ADM (Studi Kasus: Disparbud Kabupaten Bandung Barat). *Systemic: Information System and Informatics Journal*, 5(1), 48–54. <https://doi.org/10.29080/systemic.v5i1.634>
- Hidayah, E. S., & Almadani, M. (2022). Analisis Tingkat Kemajuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 4(2), 49–67. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v4i2.2680>
- Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1498–1506. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3519>
- Khaidarmansyah, & Ridwan Saifuddin. (2022). Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)Di Provinsi Lampung. *Derivatif:Jurnal Manajemen*, 16(1), 1–11.
- Manik, M., Selanno, H., & Patty, J. T. (2022). Pengaruh Disiplin Pegawai Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Maluku. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 19(2), 75-97.
- Muka, I. W., Widyatmika, M. A., & Putra, I. K. G. D. (2020). Pengembangan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Bali. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(3), 253–276. <https://doi.org/10.51172/jbmb.v1i3.142>

- Nadhifah, F., Santoso, A. F., & Falahah, F. (2023). Arsitektur Enterprise Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Domain Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Enterprise Architecture of Electronic Based Government System (SPBE) in Business Process Domain in. E-Proceeding of Engineering, 10(2), 1403–1412.
- Panjaitan, R. S., Abdurrahman, L., & Nugraha, R. A. (2021). Evaluasi Implementasi Permen PANRB Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Domain Tata Kelola Di Diskominfo Provinsi Sumatera Utara. E-Proceeding of Engineering, 8(5), 9165–9172.
- Pratama, M. A. B., Gumlang, S. F. S., & Mulyana, R. (2021). Arsitektur Enterprise Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Domain Data Arsitektur Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Electronic-Based Government System Enterprise Architecture (Spbe) on Architectural Domain Data in the Regio. E-Proceeding of Engineering, 8(5), 9088–9097.
- Pratiwi, H. D., Hayuhardhika, W., Putra, N., & Herlambang, A. D. (2020). Evaluasi Penerapan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer, 4(11), 4116–4124.
- Pratiwi, P. D. P., Putri, G. A. A., & Sasmita, G. M. A. (2020). Evaluasi SPBE pada Dinas Kesehatan Salah SatuKabupaten di Bali. JITTER: Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Komputer, 1(2), 1–10.
- Prisma, A. (2019). Evaluasi Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Pemerintah Kota Madiun. In Digital Repository Universitas Jember (Issue September 2019).
- Putri, V. D., Gumlang, S. F. S., & Nugraha, R. A. (2021). Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Domain Aplikasi di Lingkungan Daerah Kabupaten Kuningan. JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika), 6(2), 379–386. <https://doi.org/10.29100/jipi.v6i2.2118>
- Rahawarin, M. A., & Selanno, H. (2022). The Effect of Motivation and Organizational Climate on Performance of Employees at The Bureau Of Public Relations and Protocol of Regional Secretariat of Maluku Province. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 12(1), 99–108
- Ramli, M. F. (2022). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Terhadap Peningkatan Pelayanan Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Mahasiswa IPDN, 2(1), 11–21.
- Saharah, N. V., Falahah, & Maulidya, B. (2020). Analisis dan Perancangan Enterprise Architecture Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Bidang Infrastruktur Permukiman Menggunakan TOGAF ADM. E-Proceeding of Engineering, 7(2), 6679–6688.
- Sakir, A. R., & Mustari, S. H. (2022). Analisis Tantangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPT (Unit Pelayanan Teknis) Pendapatan Maros. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 5(1), 14–22.
- SAKIR, A. R., & PONTO, I. S. (2024). Analysis of Participatory Development Implementation in Bantimurung Village, Simbang District, Maros Regency. *Journal of Social Sciences and Cultural Study*, 1(3), 88–93.

- Silitonga, N. D. S., Falahah, F., & Fajar, A. (2023). SEIKO : Journal of Management & Business Analisis dan Perancangan Arsitektur Enterprise Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Domain Bisnis di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(1), 328–342.
- Supriyanto, S., Ridwan, A., Tamam, R., Santoso, M. I., Satria, D., & Mutaqin, A. I. S. (2021). Perancangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang berkelanjutan di Provinsi Banten. *Journal Industrial Servicess*, 7(1), 171–175. <https://doi.org/10.36055/12952>
- Syafnel, M. Z., Darmawan, I., & Mulyana, R. (2019). Analisis dan Perancangan Tata Kelola Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Domain Data Quality Management pada Dama DMBOK V2 (Studi Kasus : Diskominfo KBB) Analysis and Design of Data Governance System Based on Electronic Domain Quality Data Man. E-Proceeding of Engineering, 6(2), 7775–7786.
- Taqiya, N. A., Mukaromah, S., & Pratama, A. (2020). Analisis Tingkat Kematangan SPBE Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Jawa Timur. *SCAN - Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 15(1), 22–33. <https://doi.org/10.33005/scan.v15i1.1849>
- Wahyuni, N. (2023). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(2), 385–396. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v5i2.5097>
- Wamafma, Y. (2022). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Pada Dinas Persandian, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manokwari. *Jurnal Mahasiswa IPDN*, 2(1), 1–10.
- Wijatmoko, T. E. (2020). Evaluasi Keamanan Informasi Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Diy. *Cyber Security Dan Forensik Digital*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.14421/csecurity.2020.3.1.1951>
- Yunella, M., Dwi Herlambang, A., Hayuhardhika, W., & Putra, N. (2019). Evaluasi Tata Kelola Keamanan Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Malang Menggunakan Indeks KAMI. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 3(10), 9552–9559. <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- Zainul Faki, W. (2019). Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Situbondo Menggunakan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE. In Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Jember. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/99193>.